

# European Green Deal

## Author:

Hadi Prayitno  
Dani Setiawan,  
Dita Nurul Aini,  
Lukman Hakim,  
Ulfa Purwaningsih,  
Try Wahyu Widha

## The Reform Initiatives

## Phone

+62 811 99 5259

## Email

tri.indonesia01@gmail.com

## Website

www.tri.or.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7  
Menteng, Jakarta Pusat

## Apa Itu European Green Deal?

- European Green Deal (EGD) adalah sebuah petajalan/*roadmap* yang dibuat Uni Eropa pada tahun 2020 untuk memastikan bahwa kegiatan perekonomian di wilayah Uni Eropa mempertimbangkan keberlangsungan/*sustainability* pada seluruh kebijakannya. EGD memiliki target agar Uni Eropa menjadi *climate neutral* pada tahun 2050. Nilai investasi yang dialokasikan di tahun 2020 untuk EGD ini adalah sebesar 1 Triliun Euro dan terlampir dalam rencana *EU Green Deal Investment Plan*.
- EGD diharapkan bisa memberikan Uni Eropa:
  - Air segar, udara bersih, tanah sehat, dan biodiversitas.
  - Renovasi bangunan-bangunan yang efisien energi.
  - Makanan sehat dan terjangkau.
  - Tambahan transportasi publik.
  - Energi yang lebih bersih dan inovasi teknologi bersih yang mutakhir.
  - Produk yang lebih bertahan lama yang bisa diperbaiki, didaur ulang, dan digunakan kembali.
  - Mengadakan pekerjaan dan pelatihan kecakapan yang bisa digunakan di masa depan selama masa transisi.
  - Industri yang tangguh dan kompetitif secara global.
- Saat ini, EGD sudah memiliki beberapa wilayah kebijakan yang akan diintervensi (daftar ini bisa berubah di kemudian hari):
  - *Climate action*. Rencana dan aksi setiap negara untuk berkontribusi dalam mengurangi perubahan iklim dan bertransformasi menuju perekonomian yang berkelanjutan.
  - Energi Bersih (*Clean Energy*). Penambahan serta transformasi penggunaan energi yang ramah lingkungan.
  - Industri berkelanjutan (*Sustainable Industry*) yang berfokus kepada *circular industry* yang menghasilkan produk ramah lingkungan (*sustainable products*)
  - *Buildings and Renovation*. Renovasi serta pembangunan gedung, perumahan, atau infrastruktur baru yang hemat energi, tahan lama, dan mendukung gaya hidup yang lebih baik.

- *Farm to Fork*. Kebijakan untuk memangkas rantai distribusi pangan dari produsen ke ke konsumen akhir secara langsung. Kebijakan ini juga termasuk penggunaan bahan pangan yang lebih sehat seperti bebas pestisida kimia, organik, menambah sumber pangan, peningkatan kesadaran akan makanan sehat, hingga pengemasan pangan yang lebih ramah lingkungan.
  - *Sustainable and smart mobility*. Pengurangan emisi transportasi melalui penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, pengalihan transportasi dari udara ke darat dan air, penambahan transportasi publik yang ramah lingkungan, peningkatan efisiensi dan manajemen lalu lintas seluruh mode transportasi, hingga pengalihan penggunaan transportasi dari individu ke transportasi publik.
  - Mempertahankan *Biodiversity* (Keanekaragaman hayati). Dalam kebijakan ini terdapat rencana-rencana untuk restorasi lahan, sungai, dan hutan untuk pertanian organik, membantu penyerbukan alami, mengurangi pestisida, serta memperbaiki ekosistem.
  - *Sustainable Finance*. Wilayah kebijakan ini tidak memiliki rencana baru, akan tetapi mempertegas prinsip Uni Eropa dalam menyalurkan investasi untuk melakukan transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan.
- Riset dan pengembangan (*Research and Development*). Menggeser riset dan pengembangan akademis dan kenegaraan untuk mencapai tujuan iklim Uni Eropa. Horizon Europe, badan riset dan pengembangan Uni Eropa, akan menjadi sponsor utama kegiatan ini. Badan ini akan bekerjasama dengan industri dan negara anggota Uni Eropa agar bisa mencapai target-target dalam EGD.

### Permasalahan dalam EGD

- Uni Eropa tentunya sadar bahwa EGD ini bisa menghasilkan kompetisi yang tidak sehat dan membahayakan bagi negara-negara di luar Uni Eropa. Hal ini yang mereka sebut sebagai *Carbon Leakage*, atau kebocoran karbon. Kehadiran EGD akan merubah orientasi negara-negara Uni Eropa pada perdagangan rendah karbon dan berisiko:
  - Pemain industri Uni Eropa yang tidak rendah karbon akan mengalihkan kegiatan usahanya ke negara-negara lain yang tidak terlalu memperhatikan masalah lingkungan, alih-alih bertransformasi ke industri yang berkelanjutan.
  - Produk-produk yang dijual didalam Uni Eropa akan digantikan dengan produk-produk yang tidak ramah lingkungan tetapi lebih murah karena produk rendah karbon cenderung lebih mahal.
  - Produk-produk yang telah dijual di Uni Eropa yang tinggi karbon akan diekspor ke negara-negara lain, yang justru akan *offset* pencapaian pengurangan karbon Uni Eropa.
- Untuk mengantisipasi ketiga resiko tersebut. Salah satu inisiatif yang akan diterapkan adalah penerapan *Carbon Border Adjustment Mechanism* yang akan merubah nilai jual produk-produk impor dan ekspor, sesuai dengan kanton karbonnya.

### Relevansi EGD dengan Indonesia

- EGD bisa menjadi sebuah hambatan atau peluang bagi dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonominya dengan negara-negara Uni Eropa. Nilai total perdagangan Indonesia-Uni Eropa mencapai US\$ 25,5 miliar (Rp 362 triliun) dengan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US\$ 14,4 miliar (Rp 204 triliun) dan impor Indonesia dari Uni Eropa US\$ 11,1 miliar (Rp 157 triliun). Proporsi untuk setiap komoditi yang diperdagangkan antara Uni Eropa dengan Indonesia bisa berubah seiring waktu karena setiap negara memiliki skemanya sendiri untuk memenuhi EGD.
- EGD akan berdampak langsung terhadap seluruh perjanjian perekonomian dan perdagangan antara negara-negara di Uni Eropa dengan Indonesia yang sedang berlangsung atau masih dalam negosiasi, termasuk IEU-CEPA. Pemerintah dan pengusaha Indonesia perlu mengantisipasi adanya perubahan perdagangan secara tiba-

tiba dari negara-negara Uni Eropa untuk memenuhi kewajibannya dalam EGD, termasuk untuk produk-produk yang sudah diperdagangkan dalam perjanjian bilateral.

- Perubahan skema perdagangan akibat dari EGD ini akan berdampak negatif bagi UMKM yang sudah memiliki pasar di Uni Eropa karena mereka sulit untuk bertransformasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memenuhi standar EGD ini.
- Pemain industri Indonesia yang berdagang dengan Uni Eropa di produk-produk yang berlawanan dengan EGD perlu segera mengantisipasi perubahan permintaan dan persediaan akan produk-produk tersebut, seperti sumber energi berbasis fosil, hasil-hasil sumber daya alam yang tidak/belum bersertifikat sesuai yang diharapkan oleh Uni Eropa, bahan-bahan kimia untuk pertanian, serta tenaga kerja yang tidak melek teknologi dan lingkungan.
- Salah satu tantangan Indonesia menghadapi EGD terkait kesinambungan antara rencana Uni Eropa dan Indonesia dalam bertransisi ke ekonomi yang berkelanjutan. Baik Uni Eropa maupun Indonesia, saat ini sedang dalam masa transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Khusus untuk Indonesia, terdapat pula rencana untuk meningkatkan nilai dari produk alam Indonesia. Hal ini bisa dijadikan peluang bagi industri Indonesia untuk melakukan hilirisasi mineral yang lebih rendah karbon dan berkelanjutan agar bisa masuk pasar Eropa, akan tetapi ini juga bisa menjadi hambatan karena nilai investasi di Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut sangat tinggi dan bisa berdampak pada pembengkakan anggaran negara.
- Krisis antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak atas pelaksanaan EGD di Uni Eropa, paling tidak untuk beberapa tahun terakhir ini. Ketergantungan energi dan pangan Uni Eropa atas kedua negara tersebut memaksa mereka untuk mencari sumber energi dan pangan alternatif lain serta mempercepat adopsi sumber energi ramah lingkungan. Kebijakan yang baru muncul dan akan mempengaruhi EGD adalah: EU akan meningkatkan penggunaan energi dari batubara untuk 10 tahun kedepan, serta menggelontorkan tambahan 300 juta Euro untuk mempercepat adopsi sumber energi mandiri yang ramah lingkungan.
- Salah satu langkah Uni Eropa untuk melakukan transisi dan mengurangi penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan dalam EGD adalah penetapan *Carbon Border Adjustment Measures (CBAM)* atau pajak karbon lintas negara. Langkah tersebut akan menambah nilai pajak dan cukai atas produk dari negara lain yang masuk ke Uni Eropa, yang tidak ramah lingkungan. Hal ini bisa menjadi *blanket discrimination* terhadap produk-produk dari negara berkembang yang menjadi lebih mahal dan sulit bersaing dengan produk dari negara maju yang bisa lebih mudah memenuhi standar karbon rendah.
- Penetapan sertifikasi Uni Eropa untuk produk-produk ramah lingkungan sebagai tindak lanjut penerapan EGD juga tidak membantu produk-produk dari negara berkembang untuk masuk ke Uni Eropa. Selain karena penerapan sertifikasi tersebut akan menambah biaya bagi pengusaha (yang akhirnya meningkatkan harga produknya), masih ada juga permasalahan konflik pemilihan sertifikasi antara negara produsen dengan yang diminta oleh Uni Eropa.

### Rencana KADIN Indonesia

- KADIN Indonesia akan membantu para pemain dunia usaha dari Uni Eropa maupun Indonesia untuk bekerjasama dari segi pencarian pemasok, eksportir, maupun importir yang bisa memenuhi kualifikasi yang diharapkan negara-negara Uni Eropa.
- KADIN Indonesia akan membantu pemerintah Indonesia dalam memberikan arahan pada perundingan-perundingan di masa depan yang akan membahas hambatan EGD seperti tarif, pajak, atau cukai Uni Eropa untuk produk-produk dari Indonesia yang akan diekspor ke Uni Eropa. KADIN Indonesia juga siap untuk menjadi mitra bersama dalam implementasi kebijakan-kebijakan keberlangsungan di Indonesia seperti percepatan adopsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pajak karbon dan *carbon pricing*, serta transformasi produk-produk menjadi ramah lingkungan.
- KADIN Indonesia mendorong transformasi industri di Indonesia untuk lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun tetap mempertahankan efisiensi dan meningkatkan daya saingnya agar bisa masuk ke

pasar Uni Eropa dan menjadi pelopor industri ramah lingkungan di regionalnya. Selain itu, KADIN Indonesia juga mendukung transformasi lanjutan produk-produk alam Indonesia yang diekspor agar bisa meningkatkan nilai tambahnya (*value added*).

- KADIN Indonesia akan memberikan dukungannya kepada pemerintah dan pengusaha di Indonesia, terutama kepada UMKM, terkait antisipasi perubahan yang dibutuhkan dunia usaha Indonesia dalam menghadapi EGD ini.
- Untuk sektor jasa, KADIN akan bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung program pendidikan yang melekat teknologi dan mawas lingkungan, baik dalam bentuk *transfer of knowledge* (alih pengetahuan) ataupun dukungan konsultasi kepada vokasi dan politeknik di Indonesia.
- Dari segi investasi, KADIN Indonesia akan mendukung dan mengadakan semakin banyak sumber-sumber pembiayaan bagi dunia usaha Indonesia untuk bertransformasi menjadi lebih 'hijau' dan berkesinambungan. Saat ini, KADIN Indonesia sudah memiliki pendanaan Indonesia Impact Fund (IIF) dan *platform* Green Fund Digital Philanthropy yang bisa diakses oleh dunia usaha Indonesia.